

PEMBINAAN MORAL SISWA MELALUI AKTUALISASI PRILAKU AGAMA

Oleh: **Zuaidar**

Guru MTsN Tungkop Aceh Besar

ABSTRAK

Model Pembelajaran Prilaku Agama (MAPA) memiliki beberapa komponen, yaitu: tujuan, materi, metode dan evaluasi. Tujuan MAPA adalah agar peserta didik memiliki aqidah yang benar, dapat melakukan cara-cara beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan agama, memiliki akhlak/moral Islami, baik akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap diri sendiri, maupun akhlak terhadap sesama manusia. Materi yang diajarkan dalam MAPA adalah: akidah akhlak, al-Qur'an hadits, fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan lain-lain. Metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran MAPA adalah: metode pembiasaan, metode keteladanan, metode *hiwar* (dialog), metode tanya jawab, diskusi, demonstrasi, ceramah, pemberian tugas, kerja kelompok, dan lain-lain. Dan evaluasi dapat dikembangkan dalam MAPA adalah: mengamati akidah melalui tingkat intensitas ibadah, mengamati tingkat pelaksanaan ibadah, tingkat kesesuaian pelaksanaan ibadah dengan tuntunan agama Islam, dan mengamati apakah peserta didik berakhlak mulia, termasuk akhlak terhadap Allah, diri sendiri, masyarakat dan alam tempat ia hidup.

Kata Kunci: Pembinaan Moral dan Aktualisasi Prilaku Agama

A. Pendahuluan

Dalam undang-undang sisdiknas no. 20 tahun 2003¹ pendidikan diarahkan di samping mengembangkan intelektual dan keterampilan, juga memperbaiki akhlak/moral. Pembinaan moral lebih dititik beratkan pada pendidikan keagamaan yang termuat dalam sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 30.² Pendidikan keagamaan di sini berkaitan dengan usaha penanaman keimanan, ketaqwaan, akhlak dan ibadah peserta didik kepada Allah SWT. Selain itu, ia juga berkaitan dengan upaya pembinaan sikap mental spritual yang selanjutnya dapat mendasari tingkah laku peserta didik dalam berbagai bidang kehidupan³, atau dengan kata lain disebut

¹Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 5)

²Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ayat 1); Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama (ayat 2); Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (ayat 3); Dan pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis (ayat 4).

³Said Agil Husin Al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 27.

moral. Pesantren dalam konteks ini bisa menjadi salah satu referensi untuk pengembangan pembudayaan moral islami.

Usaha mewujudkan pembudayaan moral islami pada bangsa ini, perlu dipikirkan langkah setrategis dan inovatif agar ia dapat sejalan dan menjadi bagian dalam upaya memperbaiki krisis multi-dimensional yang terjadi dan begitu memprihatinkan di negara ini. Krisis tersebut telah terjadi hampir seluruh wilayah Negara Indonesia, mulai dari level atas sampai ke level bawah. Hampir setiap hari kita membaca dan mendengar di media-media massa terjadi pembunuhan, KKN, narkoba, tawuran, perampokan dan lain-lain. Kejahatan tersebut terjadi di antaranya dipengaruhi oleh krisis moral, yang berakibat terjadinya dekadensi moral, mulai dari pemimpin, intelektual, para ahli, sampai rakyat biasa.

Pengembangan moral islami dapat dilakukan dengan merujuk pada ajaran-ajaran agama Islam sebagai contoh, bila dilakukan pengkajian secara mendalam akan nampak bahwa seluruh ajaran yang terdapat di dalamnya berujung pada pembentukan etika/akhlak, seperti mengerjakan shalat bertujuan salah satunya agar pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar.⁴ Zakat dan puasa untuk menumbuhkan rasa sosial dengan membantu orang-orang yang tidak mampu. Demikian juga perintah-perintah lainnya.

Pada hakikatnya krisis moral masyarakat, tetuatom bagi siswa di sekolah tidak boleh terjadi di negara ini, dan yang perlu dilakukan adalah perubahan, perbaikan dan pembangunan dalam berbagai bidang, baik dalam bentuk fisik maupun mental/moral melalui peningkatan sumber daya manusia. Secara umum krisis moral ini terjadi disebabkan oleh: (1) longgarnya pegangan agama yang menyebabkan hilangnya pengontrol diri dari dalam (*self control*) dan lemahnya hukum sehingga terjadi pelanggaran; (2) pembinaan moral yang dilakukan orang tua, sekolah dan masyarakat kurang efektif; (3) derasnya arus budaya hidup materistik dan sekuler; dan (4) belum adanya kemauan yang sungguh dari pemerintah.⁵

Penyebab terjadinya krisis moral di atas perlu ditanggulangi dengan salah satu cara mengembangkan pendidikan yang mengarah kepada pembudayaan moral. Dan dalam makalah ini akan difokuskan pada tataran mikro atau aplikatif, yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran ke arah pembudayaan moral islami di sekolah/madrasah, di antaranya akan dikembangkan MAPA.

B. Pembinaan Moral Siswa Melalui Pendidikan

⁴Q.S al-Ankabut: 183

⁵Said Agil Husin Al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai...*, hal. 35-36.

Istilah “moral” atau “moralitas”. Moral dapat diartikan dengan “baik buruk manusia sebagai manusia”; Moralitas dapat diartikan dengan “keseluruhan norma-norma, nilai-nilai dan sikap-sikap moral seseorang atau masyarakat”, Moral mengacu pada “baik-buruk” seseorang sebagai manusia, yang berarti mengacu pada perilaku, bukan pada fisik. Jadi, bukan sifat lahiriah seperti seorang yang “ganteng (bagus)” atau “cakep (cantik)”. Sangat mungkin terjadi seseorang itu cantik, tetapi moralnya buruk atau bahkan jahat. Sedangkan etika pada dasarnya identik dengan *philosophy of moral*⁶, atau “pemikiran sistematis tentang moralitas”, di mana “yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis”. Moral hampir sama dengan etika, sebab pengertian etika sebagaimana dikemukakan William K. Frankena, adalah “*philosophical thinking about morality, moral problems, and moral judgments*”⁷ (pemikiran filosofis tentang moralitas, problem-problem moral, dan putusan/pilihan moral). Dengan kata lain, kata “etika” tidak identik dengan moral atau moralitas. Namun, dalam banyak hal tidak jarang dimaksudkan sebagai hal yang identik antara etika dan moral atau moralitas; atau keduanya mempunyai sasaran, atau bahkan maksud yang sama. Untuk lebih mempertegas pengertian istilah etika adalah:

*“It must be noticed, however, that the word “ethics” is not always used for this branch of philosophy; sometimes it is used as just another word for “morality”, and sometimes to refer to the moral code or normative theory of an individual or group, as when I spoke earlier of “Socrates’ working ethics... The terms “moral” and “ethical” are often used as equivalent to “right” or “good” and as opposed to “immoral” and “unethical”*⁸”

Gambaran moral juga dapat dilihat antara *lahiriyah* dan suara *bathiniyah* terjadi kontradiksi. Keduanya bolak balik dalam waktu yang cepat dan fluktuatif. Gambaran moral tersebut terjadi akibat komplik nilai yang terjadi antara apa yang berjalan di sekolah dengan luar sekolah dan antara dalam keluarga dengan dalam masyarakat; antara ucapan dengan perbuatan; antara peluang dengan larangan, dan seterusnya.⁹ Untuk itu nilai-nilai moral dapat menjadikan keteraturan hubungan antara sesama manusia, dan hal itu sangat mendapatkan perhatian dalam dunia pendidikan Islam.

⁶Qodri Azizy A, *Pendidikan Untuk Membangun Etika Sosial*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2003), hal. 7

⁷William K. Frankena, *Ethics*, (Englewood Cliffs: NJ Prentice Hall, 1973), hal. 4

⁸ William K. Frankena, *Ethics ...*, hal. 5

⁹Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 138

Nilai moralitas pada dasarnya harus tertanam pada hati nurani seseorang, yang harus diimplementasikan menjadi kebaikan atau kesalehan sosial, sebagai contoh tentang kejujuran. “Kejujuran” adalah nilai yang harus tertanam di lubuk hati perorangan, namun realisasi nilai kejujuran itu ada pada masyarakat. Nilai-nilai seperti ini kurang mendapatkan perhatian masyarakat, terutama para guru agama, mereka lebih dominan mengajarkan agama Islam lebih bersifat teori, seperti masalah ibadah dalam pengertian sempit (ibadah *mahdhah*), seperti shalat, puasa dan sebagainya. Keadaan ini perlu direformasi yang berorientasi pada pemaknaan dan penghayatan nilai-nilai keagamaan yang berimplikasi pada pembudayaan moral. Dan juga harus dipikirkan bagaimana melakukan pembudayaan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk membina moral islami dapat dilakukan melalui pendidikan formal, sebagaimana yang dikatakan A. Qodri Azizy, yaitu: *the process of training and developing the knowledge, skills, mind, character, etc., especially by formal schooling*¹⁰, dengan bekerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat.

Pendidikan agama Islam seharusnya bukan sekedar untuk menghafal beberapa dalil agama atau beberapa syarat rukun setiap ibadah, namun harus merupakan upaya, proses, usaha mendidik murid, di samping untuk memahami atau mengetahui, juga sekaligus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Ajaran Islam untuk diamalkan, bukan sekedar dihafal, meskipun ada pula aspek atau jenis yang harus dihafal.

Ada tiga hal penting yang akan ditransfer melalui pendidikan, yaitu nilai (*values*), pengetahuan (*knowledge*), dan ketrampilan (*skills*). Untuk itu perlu dirumuskan tujuan pendidikan yang berorientasi pada tiga hal di atas beserta strategi pencapaiannya. Tujuan pendidikan penting dirumuskan sebagai arah pelaksanaan pendidikan, sesuai dengan pernyataan James Mac Lellan, yaitu:

*“Education is a matter of purpose and focus. To educate a child is to act with the purpose of influencing the child's development as a whole person. What you do may vary. You may teach him, you may play with him, you may structure his environment, you may censor his television viewing, or you may pass laws to keep him out of bars”*¹¹

¹⁰Qodri Azizy A, *Pendidikan Untuk Membangun Etika Sosial*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2003), hal. 18

¹¹James Mac Lellan, *Phillosophy of Education*, (Englewood Cliffs: Frentice Hall, 1976), hal. 18

Ketika pendidikan dijalankan, maka yang menjadi sasaran utama atau penerimanya pada dasarnya adalah individual anak didik. Dari keberhasilan individual itu kemudian mengelompok sampai menjadi komunitas, dan pada akhirnya menjadi bangsa di sebuah negara. Demikian pula ketika menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan moral itu harus tertanam pada pribadi siswa. Ketika pribadi tersebut mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan, ia akan berkaitan erat dengan kehidupan sosial. Oleh karena itu, ketika kita menyebut pendidikan Islam, maka akan mencakup dua hal: (a) mendidik siswa/siswi untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam; (b) mendidik siswa/siswi untuk mempelajari materi ajaran Islam. Di sekolah yang dominan adalah yang pertama (a); sedangkan di madrasah yang dominan adalah yang kedua (b) namun keduanya, (a) dan (b), tetap harus diwujudkan, baik di sekolah maupun di madrasah.

Apa yang kita saksikan selama ini, entah karena kegagalan pembentukan individu atau karena yang lain, nilai-nilai yang mempunyai implikasi sosial, hampir tidak pernah mendapatkan perhatian serius. Padahal penekanan terpenting dari ajaran Islam pada dasarnya hubungan antar sesama manusia (*mu'amalah bayna al-nas*) yang sarat dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas sosial itu. Sejalan dengan makna ini, arah pelajaran etika di dalam al-Qur'an dan secara tegas di dalam hadis Nabi mengenai diutusnya Nabi adalah untuk memperbaiki moralitas bangsa Arab waktu itu.

Oleh karena itu, berbicara mengenai pendidikan agama Islam, baik makna maupun tujuannya, haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika/moral. Penanaman nilai-nilai ini juga dalam rangka keberhasilan hidup (*hasanah*) di dunia bagi anak didik yang kemudian akan mampu membuahkan kebaikan (*hasanah*) di akhirat kelak.

Untuk melakukan usaha penanaman nilai-nilai moral, terlebih dahulu, perlu diperhatikan fenomena pendidikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada akhir masa orde baru, ada tanggapan umum yang mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia gagal. Kritik itu sebenarnya ditujukan terhadap sistem pendidikan nasional sudah mulai terdengar sebelum terjadinya krisis multidimensional. Kritik itu semakin berkembang setelah lengsernya penguasa orde baru yang mengakibatkan krisis di segala bidang. Dari hasil kajian pelbagai disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala macam krisis itu berpangkal dari krisis etika/moral. Fenomena yang dapat disaksikan bukan saja praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) di tingkat elite saja, kasus-kasus kerusakan

etika/akhlak peserta didik yang masih duduk di bangku sekolah, seperti tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain sudah terjadi.

Ada anggapan bahwa salah satu sebab terjadinya krisis moral adalah pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang salah, karena sistem pendidikan nasional (baik yang dilakukan oleh sekolah maupun madrasah) yang ada selama ini, sebagaimana dideskripsikan oleh HAR Tilaar mengandung beberapa kelemahan, yaitu:

Pertama, sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. Hal ini mencakup uniformitas dalam segala bidang, termasuk cara berpakaian (seragam sekolah), kurikulum, materi ujian, sistem evaluasi, dan sebagainya. Pendek kata, sentralisasi telah dipraktekkan dalam segala bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan nasional sedetail-detailnya. Pada aspek kurikulum, misalnya hampir tidak ada ruang sama sekali bagi sekolah sebagai garda terdepan penyelenggaraan pendidikan untuk menambah atau menginovasi kurikulum yang diajarkan di sekolahnya.

Kedua, sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat. Lebih parah lagi, masyarakat hanya sebagai obyek pendidikan yang diperlakukan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk ikut menentukan jenis dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Masyarakat tidak pernah diperlakukan atau diposisikan sebagai subyek dalam pendidikan. Itulah sebabnya, model pemberdayaan (empowering) masyarakat tidak pernah diperkenalkan. Masyarakat hanyalah obyek yang harus menerima paket dan instruksi dari penguasa. Ini sama artinya dengan perlakuan atau anggapan bahwa masyarakat adalah kumpulan orang-orang bodoh yang harus dituntun, didikte, dan selalu diperintah. Atau sebaliknya, masyarakat adalah “potensi berbahaya” yang harus selalu dikukung secara ketat tanpa ada kebebasan untuk bertindak.

Ketiga, kedua sistem tersebut di atas (sentralistik dan tidak adanya pemberdayaan masyarakat) ditunjang oleh sistem birokrasi kaku yang tidak jarang dijadikan alat kekuasaan atau alat politik penguasa. Birokrasi model seperti ini menjadi lahan subur tumbuhnya budaya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan melemahnya atau bahkan hilangnya budaya prestasi dan profesionalitas, namun atas dasar kong kalikong dengan kekuasaan, koncoisme dan suap.

Keempat, terbelenggunya guru dan dijadikannya guru sebagai bagaian dari alat birokrasi. Birokrasi yang merupakan alat politik penguasa seperti uraian di atas

mencengkeram kukunya kepada guru. Akibatnya, guru menjadi apatis, kreativitas dan inovasinya mati, etos kerjanya menurun, dan tanggung jawabnya sebagai guru yang bertugas mendidik dan mengajar murid juga hilang.

Guru telah terampas kearifannya sebagai guru, ia dianggap hanyalah kepanjangan alat birokrasi penguasa, bukan figur yang digugu lan ditiru (dipercaya dan ditiru) oleh anak didik. Akibat lebih parah lagi, guru kehilangan orientasinya kepada murid, sebaliknya selalu berorientasi untuk laporan kepada “atasan”nya, sebab atasannya itulah yang menentukan hidup-matinya guru, bukan prestasi profesionalisme gurunya. Padahal guru yang baik adalah ketika orientasinya pada keberhasilan anak didiknya. Sudah barang tentu ia akan melakukan tugasnya dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk mendidik yang dilandasi ketulusan dan kesabaran, tanpa mengenal batas waktu, agar anak didiknya berhasil.

Para pejabat pendidikan harus berorientasi pada keberhasilan pendidikan, yang berarti mempunyai visi dan misi yang sama dengan visi dan misi setiap guru. Jika dapat terjadi demikian, maka sebenarnya tidak akan terjadi pertentangan kepentingan antara guru dan pejabat birokrasi pendidikan. Guru yang sudah terbiasa terkukung oleh birokrasi politik tidak dapat diubah untuk berorientasi pada profesionalisme keguruannya dalam waktu sekejap. Bahkan tidak mustahil akan melalui proses transisi, yang tidak mustahil pula kurang mendukung ke arah profesionalisme keguruannya. Guru adalah pekerjaan profesional, bukan sekedar buruh. Maka konsekuensinya harus ada upaya menaikkan standar gaji dan kesejahteraan. Namun dalam waktu beresamaan, tuntutan kenaikan gaji harus diimbangi pula dengan tuntutan kerja, prestasi dan peran guru.

Salah satu cara adalah perlu segera diwujudkan undang-undang mengenai guru. Ketika gaji, kesejahteraan, serta tuntutan prestasi dan peran guru dinaikkan, perlu dipikirkan kemungkinan perlunya rekrutmen ulang terhadap para guru yang sudah ada. Dan untuk pengangkatan guru yang baru harus ada persyaratan yang lebih ketat.

Kelima, pendidikan yang ada tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun lebih pada proses pengisian otak (kognitif). Karena itu etika, budi pekerti atau akhlak peserta didik tidak pernah menjadi perhatian atau ukuran utama dalam kehidupannya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Pendidikan untuk membentuk kepribadian belum diwacanakan dan dimasukkan dalam sistem pendidikan nasional.

Keenam, anak tidak pernah dididik atau dibiasakan untuk kreatif dan inovatif serta berorientasi pada keinginan untuk tahu (*curiosity* atau *hirsh*). Kurangnya perhatian terhadap

aspek ini menyebabkan anak hanya dipaksa menghafal dan menerip apa yang dipraktikkan guru. Anak tidak diberi ruang untuk berpikir dan berinovasi, apalagi sampai menemukan sesuatu yang baru (*discovery*). Padahal menurut teori belajar, pendidikan yang baik adalah memberikan kesempatan dan pengalaman anak pada *the enjoy of discovery*. Pengalaman ini baru dapat terlaksana jika pembelajaran yang berlangsung di kelas/sekolah memberikan ruang bebas bagi setiap murid untuk menciptakan *curiosity*. Jika ciri kelima dan keenam digabungkan (yakni berorientasi pada pembentukan kepribadian serta pembiasaan *curiosity* dan *discovery*), pendidikan akan menghasilkan anak didik yang selalu berorientasi pada perilaku terpuji dan prestasi (*'amal salih*) yang sekiranya bermanfaat bagi masyarakat.¹²

Kelemahan pendidikan sebagaimana yang telah diuraikan di atas memerlukan kepada reformasi pendidikan, antara lain dengan mengubah faktor negatif menjadi faktor positif, yaitu agar sistem pendidikan: (1) tidak kaku dan tidak selalu uniformitas; (2) menghargai pluralitas potensi kedaerahan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat; (3) bebas KKN; (4) menempatkan guru sebagai pendidik, bukan alat birokrasi politik, sehingga guru harus profesional dan mempunyai rasa terpanggil untuk menjadi guru; (5) menekankan pada kepribadian keseharian anak didik untuk menjadi anak yang beriman dan bertakwa serta menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat; dan (6) menekankan pada sikap kritis, kreatif dan inovatif bagi anak didik.

Untuk itu ada beberapa tawaran jalan keluar yang harus diambil adalah menghilangkan dan sekaligus menjawab keenam faktor tersebut. Salah satu faktor yang dominan adalah terjadinya sentralisasi pendidikan pada segala bidang. Maka jalan keluar yang harus diambil dalam reformasi pendidikan nasional adalah tekad untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan. Hal ini tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999, di mana pendidikan termasuk hal-hal yang didesentralisasikan.

Pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dari pelbagai aspeknya, termasuk orientasi masa depan calon alumninya. Untuk itu, akan menjadi wajar jika sekolah di satu daerah bukan saja berbeda dengan daerah lain, namun sekaligus dapat mengubah kurikulum berdasarkan tuntutan masa yang sedang dilalui. Tuntutan dimaksud termasuk tuntutan kerja setelah selesai sekolah. Artinya, suatu hal yang wajar jika sekolah di suatu daerah perlu mengalami perubahan kurikulumnya (meskipun kurikulum wajib tidak berubah) disebabkan ketidakmampuan (*mismatch*) alumni sekolah dengan tuntutan lapangan

¹²Tilaar HAR, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Indonesia Tera, 1999), hal. 24.

pekerjaan. Dalam batas tertentu, pendidikan dituntut untuk *link and match*, sehingga pendidikan menjadi *marketable* setelah murid lulus.

Sejarah telah mencatat bahwa pendidikan Islam telah menampakkan posisi dan perannya dalam pembinaan anak bangsa, dan telah menghasilkan para tokoh, intelektual, dan lain-lain yang bermoral. Akan tetapi dewasa ini pendidikan Islam kurang sanggup membentuk moral islami, sehingga hampir tidak lagi dianggap sebagai lembaga yang berperan sebagai wahana pembentukan moral islami, dengan terjadinya bermacam-macam penyakit sosial sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Untuk itu perlu dipikirkan dan dirumuskan kembali tentang pelaksanaan pendidikan Islam yang dapat memperbaiki krisis moral.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi krisis moral, yaitu: (1) pendidikan akhlak/moral dapat dilakukan dengan menetapkan pelaksanaan pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan, baik di lembaga pendidikan informal, formal dan non formal; (2) mengintegrasikan antara pendidikan dan pengajaran. Hampir semua para ahli pendidikan sepakat bahwa pengajaran hanya berisikan pengalihan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang ditujukan untuk mencerdaskan akal dan memberi keterampilan. Sedangkan pendidikan ditujukan kepada upaya membentuk kepribadian, sikap dan pola hidup yang berdasarkan nilai yang luhur; (3) adanya kerjasama kelompok dan usaha yang sungguh-sungguh dari orang tua, sekolah dan masyarakat; (4) Lembaga pendidikan formal harus berusaha menciptakan lingkungan yang bernuansa religius, seperti melaksanakan shalat berjamaah, menegakkan disiplin, memelihara kebersihan, kejujuran, tolong-menolong dan lain-lain; dan (5) Pendidikan moral harus menggunakan seluruh kesempatan dari berbagai sarana atau media, seperti kesempatan rekreasi, pameran, panorama alam, dan lain-lain harus dijadikan peluang untuk pembinaan moral.¹³ Langkah lain yang dapat dilakukan dalam mengatasi krisis moral, diantaranya: (1) perlunya kebijakan pemerintah tentang pengawasan yang komprehensif yang dituangkan dalam undang-undang; (2) melakukan integrasi pendidikan moral ke dalam semua disiplin ilmu dan seluruh aspek kehidupan; (3) menerapkan sanksi atau hukuman bagi orang yang kurang atau tidak bermoral yang didukung oleh undang-undang; dan (4) melakukan pembinaan moral secara kolektif melalui pendidikan, dakwah dan lain-lain.

C. Pengembangan MAPA dalam Pembelajaran

¹³Said Agil Husin Al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai...*, hal. 40-41.

Salah satu syarat dalam melaksanakan pembelajaran yang cepat dan tepat perlu membuat introduction plan (persiapan pembelajaran), dengan beberapa prinsip yang perlu diterapkan. Prinsip-prinsip tersebut ialah: (1) memahami tujuan pendidikan; (2) menguasai bahan pembelajaran; (3) memahami teori pendidikan dan pembelajaran; (4) memahami prinsip-prinsip mengajar; (5) memahami metode-metode pembelajaran; (6) memahami beberapa model pembelajaran; dan (7) memahami prinsip-prinsip evaluasi.¹⁴

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu strategi mikro untuk pembudayaan moral islami dapat dilakukan melalui pengembangan MPPA di sekolah. Pembelajaran MPPA perilaku agama ini dilakukan untuk mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan ajaran tersebut terutama berkaitan dengan moral islami dapat membudaya dalam kehidupan. Berikut ini akan dijelaskan petunjuk praktis pelaksanaan pembelajaran aktualisasi perilaku agama, yang mencakup: tujuan, materi, metode, langkah-langkah kegiatan dan evaluasi pembelajaran.

Secara umum pengembangan MPPA dapat dilakukan melalui: *Pertama*, mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam dengan cara mengungkapkan melalui kata-kata yang dapat dipahami, memberikan penjelasan dan dialog, keteladanan dan perhatian. Komunikasi yang diberikan kepada siswa melalui komunikasi yang baik, ikhlas dan cerdas, sehingga dapat meningkatkan dan memperkuat akidah, pelaksanaan ibadah yang teratur, dan pembudayaan akhlak/moral dalam kehidupan sehari-hari; *Kedua*, menciptakan hubungan antara sekolah/madrasah dengan orang tua siswa dan masyarakat dalam menata kegiatan yang bersifat religius dengan situasi yang kondusif, sehingga tercipta saling menghargai, cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan lain-lain; *Ketiga*, memberi pengalaman dengan cara melatih dan membiasakan peserta didik berperilaku Islami, dan mampu mengeksplorasi nilai-nilai ajaran Islam yang dari berbagai obyek kajian melalui keteladanan, pengamatan, *hiwar*, dan lain-lain.

Keempat, mengajarkan peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan kematangan, sehingga dapat dipahami, dihayati dan diamalkan materi-materi yang diajarkan, dan dapat dibudayakan dalam kehidupan; Dan *kelima*, melatih dan membiasakan siswa berpikir kritis religius dan bertindak secara religius pula, sehingga dapat menangkap isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. Dari gambaran umum sebagaimana yang dijelaskan di atas

¹⁴Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 13.

dapat juga dilaksanakan dalam dalam pembelajaran di kelas, yang meliputi: tujuan, materi, metode dan evaluasi pembelajaran.

1. Tujuan Pembelajaran MAPA

Tujuan pembelajaran aktualisasi perilaku agama di sekolah di antaranya adalah agar siswa mampu memperoleh hal-hal: *Pertama*, memiliki aqidah yang benar, yaitu memiliki keyakinan yang diikrarkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati dan dikerjakan oleh anggota tubuh, dengan kriteria antara lain adalah mampu melaksanakan perintah Allah dan menghentikan larangan-Nya; *Kedua*, melakukan cara-cara beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan agama, dengan kriteria antara lain: (a) mampu melaksanakan shalat wajib secara berjamaah dan shalat sunat dengan penuh keikhlasan dan kejujuran dengan niat karena Allah SWT dan sesuai dengan anjuran agama; (b) mampu melaksanakan ibadah puasa wajib dan sunat lainnya dengan penuh keikhlasan sesuai dengan ajaran agama; (c) membayar zakat *mal* dan zakat fithah dengan penuh kesadaran sesuai dengan ajaran agama; dan (4) memiliki keinginan melaksanakan ibadah haji apabila telah mampu melaksanakannya; Dan *ketiga*, memiliki akhlak/moral islami sesuai dengan dengan anjuran agama, meliputi: (a) Akhlak terhadap Allah SWT, dengan kriteria: tidak mempersekutui Allah, bertakwa kepada-Nya, tawakkal, ikhlas, dan lain-lain; (b) Akhlak terhadap Rasulullah SAW, dengan kriteria: mencintai dan memuliakannya, mengucapkan salawat, mengikuti sunnahnya, dan lain-lain; (c) Akhlak terhadap diri sendiri, dengan kriteria: jujur, hemat, tolong-menolong, sabar, ikhlas, rendah hati, tekun, tidak sombong, menghargai, dan lain-lain; Dan (d) Akhlak sesama manusia, dengan kriteria: tolong-menolong, hubungan baik dengan keluarga, tetangga dan masyarakat, berlaku adil, menciptakan perdamaian, cinta agama, tanah air, dan lain-lain.

2. Materi Pembelajaran MAPA

Materi MAPA meliputi: (1) akidah akhlak dengan pokok bahasan rukun iman, macam-macam moral terpuji (*mahmudah*), moral tercela (*madhlumah*), etika makan minum, adab berdo'a, dan lain-lain; (2) al-Qur'an hadits dengan ruang lingkup pembahsannya: ulum al-Qur'an dan ulum al-hadits, ilmu tafsir, ilmu hadits, tajwid, dan lain-lain; (3) fiqih dengan ruang lingkup pembahsannya meliputi: thaharah, shalat, zakat, puasa, haji, jual beli, pernikahan, ekonomi, dan lain-lain; (4) sejarah kebudayaan Islam, meliputi: sejarah pada masa nabi, shahabat, masa kejayaan dan kemunduran Islam, dan lain-lain; dan (5) bahasa Arab, meliputi: bentuk kata, struktur kalimat, berbicara, membaca dan lain-lain.

Semua materi tersebut di atas diajarkan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan dasar untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, yang diharapkan akan memiliki moral yang baik dan berinteraksi dengan Allah, manusia dan lingkungannya.

3. Metode MAPA

Dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran perlu dirumuskan metode pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan peserta didik dan materi yang akan diajarkan, baik dengan menggunakan satu, dua atau beberapa metode sekaligus. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran MAPA ini, antara lain adalah:

- a) Metode pembiasaan, yaitu dengan membiasakan peserta didik melakukan suatu kegiatan secara terus menerus, sehingga ia terbiasa dengan pekerjaan itu, seperti: membaca do'a sebelum belajar, berkata benar, shalat tepat waktunya, dan lain-lain.
- b) Metode keteladanan, yaitu metode mengajar yang berpusat pada guru dengan memberikan contoh teladan yang baik dari setiap perbuatannya, sehingga dilihat dan dituruti oleh siswanya, seperti: disiplin, taat, kebersihan, berpakaian, dan lain-lain.
- c) Metode *hiwar* (dialog), yaitu metode percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih tentang suatu topic bahasan yang diarah kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa bentuk *hiwar* yang dapat digunakan, yaitu: *hiwar khitabi* (dialog seruan Allah), *hiwar ta'abbudi* (dialog pengabdian kepada Allah), *hiwar washfi* (dialog deskriptif), *hiwar qiyashi* (dialog naratif), *hiwar jadali* (dialog argumentatif) dan *hiwar nabawi* (dialog nabi dengan para sahabat).¹⁵

Selain metode pembelajaran di atas, dapat juga digunakan metode pembelajaran yang sering dikemukakan dalam buku-buku metodologi pembelajaran, seperti: metode tanya jawab, diskusi, demonstrasi, ceramah, pemberian tugas, kerja kelompok, dan lain-lain.¹⁶

4. Evaluasi Pembelajaran MAPA

Evaluasi pembelajaran MAPA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a). Mengamati dan memverifikasi akidah peserta didik melalui tingkat intensitas mengerjakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-Nya.

¹⁵Jusnimar Umar, "Aktualisasi Prilaku Keberagamaan Remaja", *Tesis*, (Bandung: Pascasarjana UPI, 2006), hal. 272.

¹⁶Lihat: M. Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 34-59.

- b). Mengamati tingkat pelaksanaan ibadah peserta didik, baik ibadah wajib maupun sunat, termasuk tingkat kekhusuannya.
- c). Mengamati tingkat kesesuaian pelaksanaan ibadah dengan tuntunan agama Islam.
- d) Mengamati apakah peserta didik berakhlak mulia dan sesuai dengan anjuran agama Islam, termasuk akhlak terhadap Allah, diri sendiri, masyarakat dan alam tempat ia hidup. Akhlak tersebut meliputi antara lain: tawakkal, ikhlas, jujur, sopan santun, menolong orang lain, menepati janji, dan lain-lain.

D. Kesimpulan

Pada hakikatnya krisis moral siswa tidak boleh terjadi di negara ini, dan yang perlu dilakukan adalah perubahan, perbaikan dan pembangunan dalam berbagai bidang, baik dalam bentuk fisik maupun mental melalui peningkatan sumber daya manusia. Akan tetapi Krisis tersebut telah terjadi hampir seluruh wilayah Negara Indonesia, mulai dari level atas sampai ke level bawah. Hampir setiap hari kita membaca dan mendengar di media-media massa terjadi pembunuhan, KKN, narkoba, tawuran, perampokan dan lain-lain.

Untuk memperbaiki krisis tersebut perlu dipikirkan langkah setrategis dan inovatif agar ia dapat sejalan dan menjadi bagian dalam upaya memperbaiki krisis multi-dimensional yang terjadi dan begitu memprihatinkan di negara ini. Dan salah satu cara untuk memperbaiki krisis moral itu dapat dilakukan melalui pembudayaan moral islami melalui MAPA, sebagaimana yang dijelaskan dalam makalah ini.

MAPA memiliki komponen sama dengan pembelajaran lainnya, yaitu: tujuan, materi, metode dan evaluasi. Tujuan MAPA antara lain adalah: memiliki aqidah yang benar, melakukan cara-cara beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan agama, memiliki akhlak/moral islami, baik akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap diri sendiri, maupun akhlak terhadap sesama manusia.

Pengembangan MAPA dapat dilaksanakan dalam mata pelajaran akidah akhlak, al-Qur'an hadits, fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan lain-lain. Dan metode pembelajaran MAPA adalah: metode pembiasaan, metode keteladanan, metode *hiwar* (dialog), metode tanya jawab, diskusi, demonstrasi, ceramah, pemberian tugas, kerja kelompok, dan lain-lain. Sedangkan evaluasi dapat dilakukan dengan cara: mengamati akidah melalui tingkat intensitas ibadah, mengamati tingkat pelaksanaan ibadah, tingkat kesesuaian pelaksanaan

ibadah dengan tuntunan agama Islam, dan mengamati apakah peserta didik berakhlak mulia, termasuk akhlak terhadap Allah, diri sendiri, masyarakat dan alam tempat ia hidup.

Akhirnya, penulis merekomendasikan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan, khususnya moral agar dapat mengkaji/meneliti lebih lanjut tentang gagasan MAPA yang penulis tawarkan ini, dan akan menambah khazanah keilmuan bidang pendidikan pada umumnya dan kebudayaan moral pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Udin Syaefuddin Sa'ud, *Inovasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Basyiruddin Usman M, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- James Mac Lellan, *Phillosophy of Education*, Englewood Cliffs: Frentice Hall, 1976.
- Jusnimar Umar, "Aktualisasi Prilaku Keberagamaan Remaja", *Tesis*, Bandung: Pascasarjana UPI, 2006.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Qodri Azizy A, *Pendidikan Untuk Membangun Etika Sosial*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Ciputat: Ciputat Press, 2005
- Tilaar HAR, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Indonesia Tera, 1999.
- William K. Frankena, *Ethics*, Englewood Cliffs: NJ Prentice Hall, 1973.